

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN, DAN HIPOTESIS

2.1 Tinjauan Pustaka

Tinjauan Pustaka akan menjelaskan bagaimana variabel-variabel penelitian dikaitkan dengan teori besar (*grand theory*) yang relevan, sehingga memberikan pemahaman yang lebih komprehensif tentang penelitian ini.

2.1.1 Ketimpangan Pendapatan

Menurut *International Monetary Fund* (2015) mendefinisikan ketimpangan pendapatan sebagai kondisi dimana pendapatan tidak terdistribusi secara merata di seluruh populasi. Fenomena ketimpangan pendapatan tidak hanya mencerminkan disparitas numerik dalam penghasilan di antar individu atau rumah tangga, tetapi juga menunjukkan adanya hambatan struktural terhadap mobilitas ekonomi vertikal serta keterbatasan akses terhadap peluang ekonomi yang setara. Menurut Lakner et al., (2024) menegaskan bahwa mengurangi ketimpangan dalam suatu negara merupakan prasyarat bagi pencapaian pembangunan berkelanjutan dan strategi pengentasan kemiskinan yang efektif dan inklusif. Badan Pusat Statistik (BPS) Indonesia mengoperasionalkan ketimpangan pendapatan sebagai suatu kondisi ketidakseimbangan dalam distribusi pendapatan masyarakat yang menunjukkan ketimpangan signifikan antar kelompok penduduk, baik berdasarkan strata ekonomi, wilayah geografis, maupun karakteristik demografis lainnya.

Distribusi pendapatan adalah cara pendapatan nasional atau regional dibagikan di antara berbagai kelompok dalam masyarakat, yang mencerminkan tingkat pemerataan kesejahteraan ekonomi antar segmen populasi. Menurut Milanović (2011) dalam *World Bank Policy Research Working Paper* menegaskan ketimpangan distribusi pendapatan terjadi ketika terdapat konsentrasi pendapatan yang tidak proporsional pada sekelompok kecil populasi berpenghasilan tinggi, sementara mayoritas populasi hanya memperoleh proporsi pendapatan yang relatif kecil dari total pendapatan nasional.

Tujuan distribusi pendapatan bukan hanya memperkecil ketimpangan sosial saja, tetapi juga memiliki beberapa tujuan, antara lain:

1. Meningkatkan taraf hidup masyarakat menjadi lebih baik tidak ada masyarakat yang berada di bawah garis kesejahteraan.
2. Memberikan hak dan keadilan bagi setiap warga negara, setiap masyarakat bisa memiliki hak untuk menikmati fasilitas negara.
3. Meminimalisir resiko kriminalitas terutama perampokan, penipuan, maupun pencucian uang. Masyarakat yang memiliki perbedaan distribusi pendapatan, besar kemungkinan melakukan tindak kejahatan.
4. Menumbuhkan rasa solidaritas dan sosial yang tinggi antar lapisan masyarakat.

2.1.1.1 Penyebab Ketidakmerataan Distribusi Pendapatan

Menurut Adelman dan Morris (1973) dalam Komariah & Yuliani (2023) mengemukakan delapan faktor penyebab ketidakmerataan distribusi pendapatan di negara berkembang berikut penjelasannya.

1. Pertumbuhan populasi/penduduk yang tinggi berdampak pada menurunnya pendapatan per kapita.
2. Inflasi dimana pendapatan uang bertambah tetapi tidak diikuti secara proporsional dengan penambahan produksi barang-barang.
3. Ketidakmerataan atau ketimpangan pembangunan antardaerah.
4. Dominasi investasi dalam proyek insentif modal sehingga proporsi pendapatan modal dari tambahan kekayaan lebih besar dibandingkan proporsi pendapatan dari tenaga kerja, yang pada gilirannya meningkatkan tingkat pengangguran.
5. Rendahnya mobilitas sosial masyarakat.
6. Pelaksanaan kebijakan industri substitusi impor yang mengakibatkan kenaikan harga-harga barang industri.
7. Ketidakelastisan permintaan negara-negara maju terhadap barang ekspor negara-negara berkembang, yang memperburuk nilai tukar bagi negara berkembang dalam perdagangan internasional.
8. Hancurnya industri-industri kerajinan rakyat, seperti pertukangan dan industri rumah tangga.

2.1.1.2 Indikator Perhitungan Ketimpangan Pendapatan

1. Indeks Gini Ratio

Untuk mengukur ketimpangan dalam distribusi pendapatan, indikator yang dapat digunakan yakni rasio gini. Rasio gini merupakan salah satu metrik kuantitatif yang diterapkan untuk menilai tingkat ketimpangan distribusi pendapatan. Instrumen pengukuran ini dinyatakan dalam bentuk rasio numerik dengan rentang nilai yang terbatas pada interval antara nol hingga satu. Nilai

ekstrem pada titik nol menunjukkan kondisi distribusi yang sepenuhnya merata (*perfect equality*), di mana setiap unit ekonomi memperoleh alokasi sumber daya yang identik dan seimbang. Sebaliknya, nilai yang mencapai titik ekstrem satu menandakan tingkat konsentrasi pendapatan tertinggi (*maximum inequality*), di mana seluruh pendapatan terkonsentrasi pada satu entitas ekonomi sementara seluruh unit lainnya tidak memiliki akses sama sekali terhadap sumber daya finansial tersebut. Berdasarkan formulasi matematis, koefisien ini dapat dihitung melalui rumus sebagai berikut:

$$GR = 1 - \sum_{i=1}^n fPi(F_{Ci} + F_{Ci-1})$$

Keterangan:

GR = Indeks Gini

fPi = Frekuensi penduduk dalam kelas ke-i

F_{Ci} = Frekuensi kumulatif dan total pengeluaran atau pendapatan pada kelas ke-i

F_{Ci-1} = Frekuensi kumulatif dan total pengeluaran atau pendapatan pada kelas ke (i-1)

Standar penilaian ketimpangan Gini Ratio ditentukan dengan menggunakan kriteria seperti berikut:

- a. $GR < 0,4$, dikategorikan sebagai ketimpangan rendah.
- b. $0,4 \leq GR \leq 0,5$, dikategorikan sebagai ketimpangan sedang.
- c. $GR > 0,5$, dikategorikan sebagai ketimpangan tinggi.

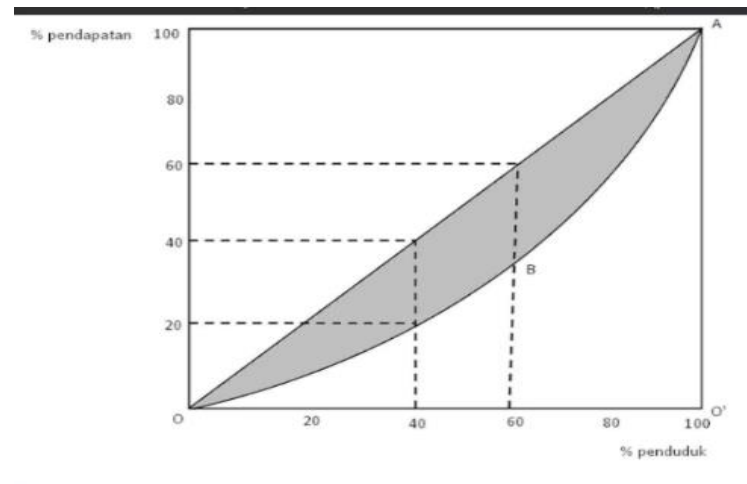
2. Kurva Lorenz

Salah satu instrumen analisis yang umum diterapkan dalam mengkaji ketimpangan distribusi pendapatan adalah Kurva Lorenz, sebuah grafik yang pertama kali diperkenalkan oleh ahli statistik Amerika, Conrad Lorenz, pada awal abad ke-20 (1905). Instrumen grafis ini berfungsi untuk mengilustrasikan korelasi kuantitatif antara proporsi populasi dan alokasi pendapatan yang diperoleh mereka dalam periode waktu tertentu.

Pada dimensi absis (sumbu mendatar), ditampilkan proporsi kumulatif dari kelompok penerima pendapatan yang dinyatakan dalam satuan persen. Sementara pada dimensi ordinat (sumbu tegak), direpresentasikan porsi pendapatan yang dialokasikan kepada setiap segmen proporsi penduduk, yang juga terakumulasi hingga mencapai nilai 100%, karena kedua sumbu koordinat memiliki skala yang identik dan mencakup jangkauan nilai yang sama 0-100%, visualisasi grafik ini menghasilkan bentuk geometris berupa persegi sempurna (bujur sangkar).

Sebuah garis lurus ditarik melintasi dari titik nol menuju titik sudut kanan atas pada persegi koordinat tersebut. Setiap lokasi yang terletak pada garis lurus ini mencerminkan kondisi di mana pangsa pendapatan yang diterima oleh suatu segmen populasi besarnya identik dengan proporsi jumlah penerima pendapatan dari kelompok yang sama. Dengan kata lain, garis tersebut merepresentasikan skenario distribusi pendapatan dalam kondisi pemerataan yang sempurna (*perfect equality*), di mana tidak terdapat disparitas dalam alokasi sumber daya finansial antar individu. Dengan demikian, dalam literatur analisis

ketimpangan, garis ini umumnya dirujuk sebagai garis pemerataan sempurna atau garis ekualisasi pendapatan.



Sumber: Rambey, 2018

Gambar 2. 1 Kurva Lorenz

Berdasarkan grafik di atas bahwa semakin besar penyimpangan antara Kurva Lorenz aktual dan garis referensi pemerataan sempurna, semakin tinggi intensitas ketimpangan distribusi pendapatan. Peningkatan dalam ketimpangan pendapatan menyebabkan Kurva Lorenz menunjukkan karakteristik berupa penguatan kemelengkungan dan secara progresif mengalami pergeseran menuju titik potong sumbu absis (sumbu mendatar) di bagian bawah. Dengan demikian, topografi kurva ini berfungsi sebagai indikator visual yang sensitif terhadap perubahan tingkat disparitas pendapatan dalam suatu wilayah.

3. Penggolongan Penduduk

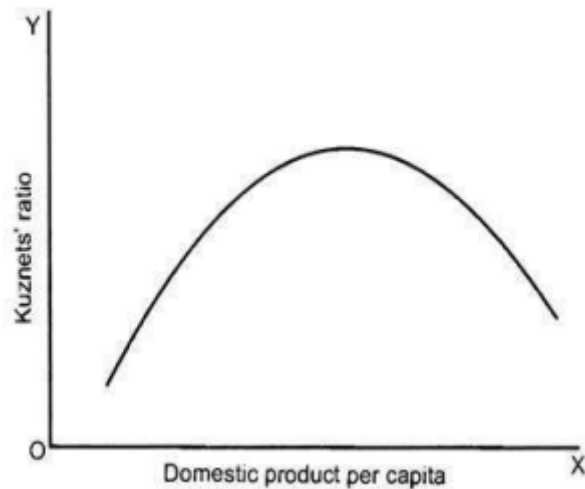
Menurut World Bank, cara untuk mengetahui ketimpangan pendapatan. Berdasarkan kriteria yang ditetapkan oleh Bank Dunia untuk menilai

distribusi pendapatan, khususnya porsi yang diterima oleh 40% penduduk berpenghasilan rendah, kategori-kategori terkait ketimpangan distribusi pendapatan adalah sebagai berikut:

- a. Apabila 40% penduduk berpendapatan rendah memperoleh kurang dari 12% dari total pendapatan penduduk, hal tersebut menunjukkan tingkat ketimpangan pendapatan yang tinggi.
- b. Apabila 40% penduduk berpendapatan sedang menerima antara 12%-17% persen dari total pendapatan penduduk, maka ketimpangan pendapatan dianggap sedang.
- c. Apabila 20% penduduk berpendapatan tinggi menerima kurang dari 17% dari total pendapatan penduduk, hal tersebut mengindikasikan ketimpangan pendapatan yang tinggi.

2.1.1.3 Teori Hipotesis U Terbalik

Teori Kuznets (1995) dalam Saipudin (2024) menghadirkan perspektif penting dalam memahami hubungan dinamis antara pertumbuhan ekonomi dan perubahan ketimpangan pendapatan di berbagai tahapan pembangunan negara. Menurut hipotesis U-terbalik yang dipelopori oleh Kuznets terdapat tiga fase utama yaitu fase pertama, ketimpangan pendapatan meningkat, pada fase kedua, ketimpangan mencapai tingkat tertinggi, dan pada fase ketiga, ketimpangan mulai menurun seiring dengan makin berkembangnya perekonomian. Untuk memahami hubungan dinamis antara pertumbuhan ekonomi dan ketimpangan pendapatan, berikut disajikan gambar kurva Kuznets yang mendemonstrasikan pola empiris dari fenomena ekonomi tersebut.



Sumber: Ogunjobi et al., (2024)

Gambar 2. 2 Kurva U-Terbalik

Perjalanan pembangunan ekonomi suatu negara menunjukkan pola yang menarik pada fase awal industrialisasi, ketimpangan pendapatan cenderung meningkat seiring dengan pertumbuhan ekonomi karena terbentuknya peluang investasi baru yang hanya dapat diakses oleh pihak yang memiliki modal awal dan keterbatasan akses untuk kelompok petani yang migrasi ke kota dengan upah yang rendah. Namun, setelah mencapai titik tertentu dalam tingkat pendapatan per kapita, fenomena ini berbalik arah dimana pertumbuhan ekonomi lebih lanjut malah menurunkan ketimpangan distribusi pendapatan. Titik balik ini terjadi ketika struktur ekonomi mencapai fase transisi dari sektor pertanian ke industri dan jasa, diikuti dengan peningkatan investasi dalam sumber daya manusia, akses pendidikan yang lebih luas, dan kebijakan redistribusi pendapatan yang lebih inklusif.

2.1.2 Indeks Pembangunan Manusia

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) atau dalam terminologi internasional disebut *Human Development Index* (HDI) merupakan suatu ukuran komposit yang mengintegrasikan tiga dimensi pembangunan manusia untuk mengukur pencapaian pembangunan di tingkat regional maupun nasional. *United Nations Development Programme* (2023) mendefinisikan IPM sebagai suatu ukuran statistik komposit dari indikator harapan hidup, pendidikan, dan pendapatan per kapita yang digunakan untuk mengelompokkan negara-negara ke dalam empat tingkatan pembangunan manusia yang mencerminkan komitmen masyarakat internasional terhadap pembangunan berkelanjutan yang berpusat pada manusia.

Berdasarkan Badan Pusat Statistik (2014) tujuan utama pengukuran Indeks Pembangunan Manusia adalah untuk menciptakan lingkungan yang memungkinkan rakyat untuk menikmati umur panjang, sehat, dan menjalankan kehidupan yang produktif. IPM didesain untuk menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan dengan memposisikan pembangunan manusia sebagai tujuan akhir pembangunan, bukan hanya sekadar alat pembangunan.

Badan Pusat Statistik mengidentifikasi tiga manfaat strategis dari IPM bagi perencanaan pembangunan berikut penjelasannya.

1. IPM berfungsi sebagai indikator penting untuk menilai keberhasilan upaya peningkatan kualitas hidup manusia, sehingga memungkinkan evaluasi komprehensif terhadap efektivitas kebijakan sosial dan kesehatan dalam meningkatkan kesejahteraan populasi.

2. IPM memfasilitasi penentuan peringkat atau tingkat pembangunan suatu wilayah, memungkinkan komparasi antarwilayah dan antarperiode untuk mengidentifikasi disparitas pembangunan manusia serta menentukan prioritas alokasi sumber daya pembangunan.
3. IPM merupakan data yang sangat strategis, karena selain sebagai ukuran kinerja pemerintah, IPM juga berperan sebagai salah satu faktor penentu alokasi Dana Alokasi Umum (DAU), sehingga berdampak langsung terhadap distribusi sumber daya finansial antarprovinsi dan kabupaten/kota untuk mendukung pembangunan yang lebih inklusif dan merata.

2.1.2.1 Pengukuran Indeks Pembangunan Manusia

UNDP menyempurnakan metode penghitungan IPM untuk mencerminkan kondisi sosial ekonomi yang lebih akurat dan relevan, salah satu perubahan signifikan terjadi pada tahun 2010. Dengan mengganti indikator Angka Melek Huruf (AMH) dan Angka Partisipasi Kasar (APK) menjadi indikator Rata-rata Lama Sekolah (RLS) dan Harapan Lama Sekolah (HLS), di sisi lain PDB per kapita diubah menjadi angka Produk Nasional Bruto (PNB) per kapita. Selain perubahan pada indikator, UNDP memperkenalkan konsep IPM yang disesuaikan dengan ketimpangan *Inequality-adjusted Human Development Index* atau IHDI yang bertujuan menghilangkan ketimpangan dalam akses terhadap kesehatan, pendidikan, atau pendapatan dengan mengubah metode penghitungan dari aritmatik menjadi geometrik sehingga di dapatkan rumus Indeks Pembangunan Manusia dihitung sebagai rata-rata geometrik dari indeks kesehatan, pendidikan, dan pengeluaran (Badan Pusat Statistik, 2014).

$$IPM = \sqrt[3]{I_{Kesehatan} \times I_{Pendidikan} \times I_{Pengeluaran}} \times 100$$

2.1.2.2 Dimensi Indeks Pembangunan Manusia

Berdasarkan penyempurnaan metode perhitungan Indeks Pembangunan Manusia didapatkan bahwa dimensinya yaitu:

1. Dimensi Kesehatan

Menggunakan variabel Angka Harapan Hidup saat Lahir (AHH) atau dalam terminologi internasional disebut *Life Expectancy at Birth* merupakan indikator tunggal yang mewakili dimensi kesehatan dalam pengukuran IPM.

2. Dimensi Pendidikan

Dimensi pendidikan dalam IPM metode baru melalui kombinasi dua indikator terpisah yang saling melengkapi, memberikan gambaran holistik tentang kualitas dan akses pendidikan di suatu wilayah.

- a. Harapan Lama Sekolah (HLS) dihitung untuk penduduk berusia 7 tahun ke atas, dan merepresentasikan proyeksi investasi dalam sistem pendidikan yang menunjukkan berapa lama rata-rata seorang anak diharapkan menghabiskan waktu di institusi pendidikan formal.
- b. Rata-rata Lama Sekolah (RLS) dihitung untuk populasi berusia 25 tahun ke atas, karena kelompok usia ini telah menyelesaikan atau mendekati penyelesaian pendidikan formal mereka, sehingga merepresentasikan stok pencapaian pendidikan yang sudah terakumulasi dalam masyarakat.

3. Dimensi Pengeluaran

Pengeluaran per kapita yang disesuaikan (PPP) berbeda dengan indikator pengeluaran nominal, pengeluaran per kapita yang disesuaikan menggunakan

Paritas Daya Beli (*Purchasing Power Parity*) untuk mengoreksi perbedaan tingkat harga antarwilayah, sehingga konsumsi yang sama di dua lokasi berbeda dapat dibandingkan secara valid.

2.1.2.3 Teori *Human Capital*

Teori *human capital* yang dipelopori oleh Becker (1964) dalam Emeka et al., (2025) menjelaskan bahwa kualitas sumber daya manusia merupakan faktor utama dalam meningkatkan produktivitas tenaga kerja dan distribusi pendapatan di suatu wilayah. Indeks Pembangunan Manusia berfungsi sebagai proksi operasional dari teori *human capital* dengan mengintegrasikan tiga dimensi, yaitu kesehatan (angka harapan hidup), pendidikan (lama dan kualitas sekolah), dan pengeluaran (pengeluaran per kapita). Peningkatan Indeks Pembangunan Manusia di suatu wilayah mencerminkan perbaikan investasi dalam *human capital* masyarakat, yang selanjutnya meningkatkan kapasitas produktif penduduk melalui tenaga kerja yang lebih sehat, terdidik, dan memiliki akses terhadap sumber daya ekonomi yang lebih baik, sehingga pertumbuhan ekonomi akan meningkat yang pada akhirnya terjadinya penurunan ketimpangan pendapatan. Hal ini dikarenakan *workforce* yang lebih berkualitas mampu memanfaatkan peluang ekonomi yang lebih luas dan mencapai pendapatan yang lebih tinggi, khususnya bagi kelompok masyarakat yang sebelumnya tertinggal.

2.1.3 Upah Minimum Provinsi

Upah Minimum Provinsi adalah upah bulanan terendah yang ditetapkan oleh gubernur setiap tahun untuk berlaku di seluruh kabupaten atau kota dalam satu provinsi sebagai jaring pengaman bagi perlindungan hak-hak pekerja. Menurut

Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan, Upah Minimum Provinsi merupakan upah bulanan terendah yang terdiri atas upah tanpa tunjangan atau upah pokok dan tunjangan tetap. Upah merupakan kebijakan yang bertujuan memberikan perlindungan pemerataan pendapatan dan peningkatan kesejahteraan hidup bagi pekerja/buruh, serta menjadi alat ukur/kontrol pemerintah terhadap kewajiban yang harus ditunaikan oleh perusahaan/pengusaha. Berdasarkan Pasal 88 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, pemerintah menetapkan kebijakan pengupahan yang melindungi pekerja atau buruh dengan memberikan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Adapun tujuan utama kebijakan upah minimum provinsi sebagai berikut.

1. Memberikan perlindungan hukum kepada pekerja dari praktik pembayaran upah yang terlalu rendah dan tidak mencerminkan nilai pekerjaan yang telah dilakukan, sehingga menjamin standar kehidupan yang minimal bagi tenaga kerja.
2. Mengarahkan upah minimum menuju pencapaian Kebutuhan Hidup Layak (KHL) yang telah ditetapkan, dengan tujuan agar pendapatan pekerja dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup yang wajar dan bermartabat di setiap daerah.
3. Menghindari atau mengurangi persaingan upah yang tidak sehat di antara pekerja dalam kondisi pasar kerja yang surplus (kelebihan penawaran tenaga kerja).
4. Mewujudkan kesejahteraan sosial bagi pekerja dan keluarganya serta mencegah dan mengurangi kemiskinan kebijakan upah minimum yang layak dapat berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

5. Mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif dengan memperhatikan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi daerah.

2.1.3.1 Penetapan Upah Minimum

Setiap tahun, pemerintah Indonesia menentukan besaran upah minimum sebagai upaya menjamin pekerja menerima penghasilan sesuai kebutuhan dasarnya, di samping tetap mempertimbangkan aspek produktivitas dan perkembangan ekonomi daerah. Penetapan upah minimum di tingkat provinsi dan kabupaten/kota menjadi tanggung jawab gubernur sebagai kepala daerah. Dalam menentukan nominal upah minimum, digunakan rumus matematis yang memperhitungkan upah tahun berjalan, tingkat inflasi dari bulan September tahun sebelumnya hingga September tahun berjalan, serta persentase pertumbuhan ekonomi (produk domestik bruto). Secara umum, rumusnya disusun sebagai berikut:

$$UM_n = UM_t + \{UM_t \times (\text{Inflasi} + \% \Delta PDB_t)\}$$

Keterangan:

UM_n = Upah minimum yang akan ditetapkan

UM_t = Upah minimum tahun berjalan

Inflasi = Inflasi yang dihitung dari september tahun yang lalu sampai dengan periode september tahun berjalan

ΔPDB_t = Pertumbuhan Produk Domestik Bruto yang dihitung dari pertumbuhan Produk Domestik Bruto yang mencakup periode kuartal III dan IV tahun sebelumnya dan periode kuartal I dan II tahun berjalan.

2.1.3.2 Teori Upah Efisiensi

Teori upah efisiensi yang dikembangkan oleh Shapiro & Stiglitz E (1985) dalam Lubis et al., (2026) menjelaskan tentang mengapa perusahaan bersedia membayar upah yang lebih tinggi dari tingkat keseimbangan pasar dengan menunjukkan bahwa pembayaran upah yang lebih tinggi menciptakan insentif bagi pekerja untuk meningkatkan produktivitas, mengurangi tingkat *turnover* karyawan, dan menarik calon pekerja dengan kualitas yang lebih unggul. Sejalan dengan prinsip teori upah efisiensi yang menyatakan bahwa peningkatan upah meningkatkan produktivitas pekerja melalui peningkatan kesehatan, nutrisi, dan intensitas upaya kerja, kebijakan upah minimum provinsi berfungsi sebagai mekanisme untuk mendistribusikan pendapatan kepada kelompok pekerja berpenghasilan rendah. Ketika pemerintah menetapkan *floor wage* melalui upah minimum provinsi, hal ini secara langsung meningkatkan pendapatan pekerja yang sebelumnya berada di bawah tingkat upah minimum yang baru. Mekanisme *wage compression effect* yang dihasilkan dari kebijakan upah minimum ini mencerminkan prinsip *fair wage effort hypothesis* dalam teori upah efisiensi, dimana ketimpangan upah antara pekerja berpenghasilan rendah dan menengah menjadi lebih sempit karena kelompok pekerja di bawah menerima kenaikan upah yang signifikan.

2.1.4 Produk Domestik Regional Bruto

Menurut Badan Pusat Statistik (2024) Produk Domestik Regional Bruto adalah nilai total dari semua barang dan jasa yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu daerah selama satu tahun, di mana nilainya dihitung berdasarkan nilai

tambah yang dihasilkan oleh setiap sektor ekonomi. PDRB menjadi alat ukur yang penting bagi pemerintah dan pemangku kepentingan untuk menganalisis kinerja ekonomi daerah, mengidentifikasi sektor-sektor yang berkembang pesat, dan merumuskan kebijakan pembangunan ekonomi yang tepat sasaran.

Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan (PDRB ADHK) adalah nilai PDRB yang dinyatakan dengan menggunakan harga-harga yang berlaku pada tahun dasar tertentu, yaitu tahun 2010. Data PDRB ADHK berfungsi untuk mengukur pertumbuhan ekonomi riil suatu provinsi tanpa pengaruh perubahan harga atau inflasi, sehingga memberikan gambaran yang lebih akurat tentang peningkatan atau penurunan output produksi sesungguhnya dari tahun ke tahun.

Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku (PDRB ADHB) adalah nilai PDRB yang dicatat berdasarkan harga-harga yang sedang berlaku pada tahun yang bersangkutan, mencerminkan nominal nilai sebenarnya dari barang dan jasa yang diproduksi pada saat pengukuran dilakukan. PDRB ADHB berfungsi untuk memberikan gambaran nilai ekonomi nominal suatu provinsi dalam periode tertentu. Data ini juga digunakan untuk menghitung kontribusi provinsi terhadap total PDRB nasional, menganalisis proporsi sektor-sektor ekonomi, dan mengevaluasi kinerja ekonomi relatif antarwilayah dalam nilai rupiah yang sesungguhnya.

2.1.4.1 Perhitungan Pendekatan Produk Domestik Regional Bruto

PDRB dapat dihitung dengan menggunakan tiga pendekatan berbeda yang saling melengkapi berikut penjelasan lengkapnya.

1. Pendekatan Produksi

Pendekatan ini memandang PDRB sebagai jumlah nilai tambah (output dikurangi konsumsi) yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu daerah selama satu tahun. Adapun rumus dari pendapatan produksi yaitu sebagai berikut:

$$Y = \sum (\text{Nilai Tambah Sektor-sektor Produksi})$$

Dalam penyajiannya unit-unit produksi tersebut dikelompokkan menjadi 17 kategori lapangan usaha yaitu sebagai berikut:

- a. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan
- b. Pertambangan dan Penggalian
- c. Industri Pengolahan
- d. Pengadaan Listrik dan Gas
- e. Pengadaan Air, Pengolahan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang
- f. Konstruksi
- g. Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor
- h. Transportasi dan Pergudangan
- i. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum
- j. Informasi dan Komunikasi
- k. Jasa Keuangan dan Asuransi
- l. Real Estate
- m. Jasa Perusahaan
- n. Administrasi Pemerintah, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib
- o. Jasa Pendidikan

p. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial

q. Jasa Lainnya

2. Pendekatan Pendapatan

Berdasarkan pendekatan ini mengukur PDRB sebagai jumlah total pendapatan atau balas jasa yang diterima oleh faktor-faktor produksi yang dimiliki oleh penduduk suatu daerah, mencakup upah tenaga kerja, sewa tanah, bunga modal, dan keuntungan pengusaha. Adapun rumus dari pendekatan pendapatan yaitu sebagai berikut:

$$Y = w + r + i + P$$

Keterangan:

Y = Pendapatan Nasional

r = Pendapatan dari upah, gaji, dan lainnya

w = Pendapatan bersih dari sewa

i = Pendapatan dari bunga

p = Pendapatan dari keuntungan perusahaan dan usaha perorangan

3. Pendekatan Pengeluaran

Pendekatan ini memandang PDRB sebagai penjumlahan dari pengeluaran konsumsi rumah tangga, pengeluaran pemerintah, investasi atau pembentukan modal tetap bruto, dan ekspor neto (ekspor dikurangi impor) di wilayah tersebut. Rumus dari pendekatan ini sebagai berikut:

$$Y = C + I + G + (X - M)$$

Keterangan:

Y = Pendapatan Nasional

C = Konsumsi rumah tangga

I = Investasi

G = Pengeluaran pemerintah

X = Ekspor

M = Impor

2.1.4.2 Teori Pertumbuhan Neoklasik

Teori pertumbuhan neoklasik yang dikembangkan oleh M. Solow (1956) dalam Juhro & Trisnanto (2018) menjelaskan bahwa pertumbuhan ekonomi jangka panjang ditentukan oleh akumulasi modal, pertumbuhan tenaga kerja, dan kemajuan teknologi. Dalam model Solow-Swan, output perekonomian dihasilkan dari kombinasi penggunaan faktor produksi berupa modal dan tenaga kerja yang didukung oleh tingkat teknologi. Peningkatan investasi modal akan meningkatkan kapasitas produksi, sementara pertumbuhan tenaga kerja memperluas kemampuan perekonomian dalam menghasilkan output. Namun, dalam jangka panjang pertumbuhan ekonomi tidak hanya bergantung pada akumulasi modal dan tenaga kerja, tetapi juga pada kemajuan teknologi yang meningkatkan efisiensi penggunaan faktor produksi. Melalui proses tersebut, perekonomian akan bergerak menuju kondisi keseimbangan jangka panjang atau *steady state*.

Implikasi dari teori pertumbuhan neoklasik terhadap pembangunan wilayah menunjukkan bahwa mobilitas faktor produksi seperti modal dan tenaga kerja memungkinkan terjadinya proses konvergensi ekonomi antarwilayah. Wilayah yang memiliki tingkat modal dan produktivitas yang lebih rendah cenderung memiliki tingkat pengembalian investasi yang lebih tinggi sehingga dapat menarik

aliran investasi dan aktivitas ekonomi baru. Proses ini mendorong peningkatan produksi dan pendapatan di wilayah yang relatif tertinggal, yang tercermin dalam meningkatnya Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Dengan meningkatnya aktivitas ekonomi dan kesempatan kerja di wilayah yang sebelumnya kurang berkembang, kesenjangan tingkat pendapatan antarwilayah secara bertahap dapat berkurang sehingga ketimpangan pendapatan dapat menurun.

2.1.5 Infrastruktur

Infrastruktur didefinisikan sebagai keseluruhan fasilitas, struktur dasar, perangkat keras, dan perangkat lunak, baik yang bersifat fisik maupun nonfisik, yang diperlukan untuk menunjang dan memfasilitasi berbagai kegiatan ekonomi dan sosial masyarakat dalam suatu wilayah. Menurut World Bank (1994), infrastruktur adalah satu set struktur yang bergabung satu dengan yang lain dan membentuk satu rangka yang menyokong keseluruhan struktur tertentu. Secara substansi, infrastruktur berfungsi sebagai fondasi dan katalisator untuk melancarkan pergerakan barang, jasa, manusia, dan informasi, sehingga kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi dapat berjalan dengan optimal dalam memenuhi kebutuhan dasar masyarakat serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Berdasarkan klasifikasi dari World Bank (1994), infrastruktur dibagi menjadi tiga kategori utama yang saling melengkapi:

1. Infrastruktur Ekonomi

Infrastruktur ekonomi merupakan infrastruktur fisik yang diperlukan secara langsung untuk menunjang dan memfasilitasi aktivitas-aktivitas ekonomi

produktif dalam suatu daerah. Infrastruktur ekonomi mencakup tiga komponen utama, yaitu:

- a. *Public Utilities* (utilitas publik), meliputi fasilitas-fasilitas penyediaan jasa publik seperti telekomunikasi, penyediaan air bersih dan sistem sanitasi, ketenagalistrikan, dan gas bumi.
- b. *Public Works* (pekerjaan umum), meliputi berbagai struktur fisik seperti jalan raya, bendungan, kanal, saluran irigasi, dan sistem drainase.
- c. Sektor Transportasi, meliputi infrastruktur untuk pergerakan barang dan manusia seperti jalan kereta api, pelabuhan, lapangan terbang (bandara), dan berbagai fasilitas transportasi lainnya.

2. Infrastruktur Sosial

Infrastruktur sosial adalah aset dan fasilitas yang dirancang untuk mendukung kesehatan, pendidikan, kualitas hidup, dan kesejahteraan masyarakat secara langsung. Infrastruktur sosial mencakup:

- a. Fasilitas pendidikan seperti sekolah, perguruan tinggi, dan perpustakaan
- b. Fasilitas kesehatan seperti rumah sakit, puskesmas, dan klinik
- c. Sarana rekreasi dan olahraga seperti taman publik, stadion, dan sarana hiburan lainnya

3. Infrastruktur Administrasi

Infrastruktur administrasi juga dikenal sebagai infrastruktur institusional merujuk pada sistem, kelembagaan, dan kerangka hukum yang diperlukan untuk menjalankan fungsi-fungsi pemerintahan dan pengaturan sosial ekonomi.

Infrastruktur administrasi mencakup:

- a. Sistem penegakan hukum dan keadilan
- b. Kontrol administrasi, koordinasi, dan fungsi pemerintahan
- c. Aspek-aspek budaya dan nilai-nilai sosial yang berlaku

2.1.5.1 Infrastruktur listrik

Infrastruktur listrik merupakan sistem dan fasilitas fisik yang dibangun untuk menghasilkan, menyalurkan, dan mendistribusikan tenaga listrik kepada masyarakat. Infrastruktur ini mencakup pembangkit listrik, jaringan transmisi, jaringan distribusi, serta berbagai perangkat pendukung yang memastikan energi listrik dapat dialirkan secara stabil hingga sampai kepada konsumen rumah tangga maupun sektor industri. Melalui proses transmisi dan distribusi tersebut, listrik dapat diakses oleh berbagai wilayah sehingga menjadi salah satu prasyarat penting bagi aktivitas ekonomi. Ketersediaan jaringan listrik yang merata memungkinkan daerah-daerah untuk terhubung dengan sumber energi yang dibutuhkan dalam kegiatan produksi, pelayanan publik, maupun aktivitas ekonomi masyarakat.

Setelah listrik terdistribusi kepada masyarakat, pemanfaatannya tercermin dalam tingkat konsumsi listrik yang dapat menjadi katalisator pertumbuhan ekonomi. Konsumsi listrik yang lebih tinggi umumnya mencerminkan meningkatnya aktivitas ekonomi karena listrik mendukung produktivitas tenaga kerja, efisiensi operasi industri, serta akses masyarakat terhadap berbagai layanan dasar. Akses listrik yang memadai juga membuka peluang usaha baru dan meningkatkan efisiensi produksi di sektor industri maupun pertanian. Namun, apabila distribusi dan kualitas layanan listrik tidak merata, wilayah yang memiliki akses listrik lebih baik cenderung menarik investasi dan mengalami pertumbuhan

ekonomi yang lebih cepat dibandingkan daerah yang akses listriknya terbatas. Oleh karena itu, perbedaan konsumsi listrik antarprovinsi sering kali mencerminkan kesenjangan produktivitas dan pembangunan ekonomi regional yang pada akhirnya dapat memperkuat maupun mengurangi ketimpangan pendapatan antarwilayah.

2.1.5.2 Teori Infrastruktur dan Pembangunan Ekonomi

Berdasarkan teori infrastruktur dan pembangunan ekonomi oleh Calderón & Servén (2004) melalui penelitian empiris komprehensif mereka terhadap lebih dari 100 negara. Teori ini menjelaskan bahwa infrastruktur publik, bukan hanya sekadar fasilitas pendukung tetapi merupakan elemen yang memungkinkan kegiatan ekonomi dan pasar untuk berfungsi dengan efisien di berbagai sektor industri. Infrastruktur yang memadai mengurangi biaya produksi dan transaksi dengan meningkatkan mobilitas faktor-faktor produksi, memperluas akses pasar, dan memungkinkan wilayah tertinggal untuk terhubung dengan pusat kegiatan ekonomi sehingga dapat mengakses peluang produktif yang lebih luas.

Dalam konteks infrastruktur kelistrikan, ketersediaan jaringan listrik yang memadai memungkinkan aktivitas produksi, distribusi, dan konsumsi berjalan lebih optimal sehingga mendorong peningkatan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi regional. Pemanfaatan infrastruktur kelistrikan tersebut tercermin melalui tingkat konsumsi listrik di suatu wilayah. Oleh karena itu, konsumsi listrik sering digunakan sebagai indikator yang menggambarkan intensitas aktivitas ekonomi dan tingkat pemanfaatan energi dalam kegiatan produksi maupun konsumsi masyarakat, yang pada akhirnya dapat memengaruhi tingkat ketimpangan pendapatan antarwilayah.

2.1.6 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu berisi dokumentasi dari berbagai studi yang telah dilaksanakan sebelumnya dan memiliki kaitan langsung dengan fenomena yang akan diteliti oleh penulis. Manfaat utama dari penggunaan penelitian terdahulu adalah untuk menyediakan kerangka referensi komparatif dan memperkuat robustness dari kesimpulan-kesimpulan yang dihasilkan dari proses analisis penelitian. Ekstrak ringkas dari penelitian-penelitian terdahulu yang relevan disajikan dalam bentuk tabel sebagai berikut:

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

No	Judul Peneliti, dan Tahun	Persamaan	Perbedaan	Hasil	Sumber Referensi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Ketimpangan Pendapatan di Pulau Jawa Muhammad Farhan dan Sugianto (2022)	- Ketimpangan Pendapatan - IPM	- Konsumsi listrik - UMP - PDRB - Tingkat pengangguran - Tingkat kemiskinan	Variabel tingkat kemiskinan dan ipm berpengaruh terhadap ketimpangan pendapatan sedangkan tingkat pengangguran tidak berpengaruh terhadap ketimpangan pendapatan di Pulau Jawa	SIBATIK Journal, Vol. 1 No. 4, Maret 2022
2	Analisis Determinan Ketimpangan Pendapatan di Pulau Jawa Pasoman dan Nugroho Sumarjiyanto Benedictus Maria (2024)	- Ketimpangan Pendapatan - PDRB - IPM - UMP	- Konsumsi listrik - Jumlah Penduduk - Tingkat Pengangguran Terbuka	PDRB dan jumlah penduduk tidak berpengaruh signifikan. Pengangguran dan IPM berpengaruh positif signifikan. Upah minimum berpengaruh negatif signifikan secara parsial. Secara simultan semua variabel berpengaruh	BISECER, Vol. VII No. 2, Juli 2024

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
				signifikan terhadap ketimpangan pendapatan	
3	Pengaruh PDRB Sektor, Inflasi, dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Ketimpangan Pendapatan di Pulau Jawa Nur Iman Hakim Al Faqih dan Siti Alfidhatun (2025)	- Ketimpangan Pendapatan - PDRB	- Konsumsi listrik - IPM - UMP - Inflasi	PDRB sektor sekunder berpengaruh negatif dan signifikan, sementara inflasi berpengaruh positif signifikan. PDRB sektor primer, tersier dan pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh signifikan terhadap ketimpangan pendapatan	<i>Journal of Management Economics, and Entrepreneur</i> , Vol 4 No. 1, Juni 2025
4	Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Ketimpangan Distribusi Pendapatan di Pulau Jawa Tahun 2014-2020 Resta Dwi Andina, Jajang, dan Supriyanto (2021)	- Ketimpangan pendapatan - IPM - PDRB	- UMP - Konsumsi listrik - Tingkat Pengangguran Terbuka	Indeks pembangunan manusia dan produk domestik regional bruto perkapita berpengaruh negatif dan signifikan terhadap ketimpangan distribusi pendapatan	JMP, Vol 13 No.1, Juni 2021
5	Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, IPM, dan UMP Terhadap Ketimpangan Distribusi Pendapatan Provinsi-Provinsi di Pulau Jawa	- Ketimpangan pendapatan - IPM - UMP	- Konsumsi listrik - Pertumbuhan Ekonomi	pertumbuhan ekonomi dan IPM tidak, sedangkan UMP berpengaruh signifikan terhadap ketimpangan distribusi pendapatan	SINOMIKA, Vol. 1 No. 4, 2022

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Tahun 2011-2020				
	Berliana Ivanovi Sulistyaningrum, Ardito Bhinadi, dan Rini Dwi Astuti (2022)				
6	Analisis Ketimpangan Pendapatan di Pulau Jawa & Faktor yang Mempengaruhinya Tahun 2010-2019	- Ketimpangan Pendapatan - PDRB - IPM	- UMP - Konsumsi listrik - Jumlah Penduduk	PDRB dan Jumlah Penduduk berpengaruh positif signifikan terhadap ketimpangan ketimpangan pendapatan, sedangkan Indeks Pembangunan Manusia tidak berpengaruh terhadap Ketimpangan Pendapatan	Jurnal Ekonomi Trisakti, vol 2 No. 1, April 2022
	Zhilal Ilvadea Violin dan M. Yudhi Lutfhi (2022)				
7	Pengaruh IPM dan Investasi Terhadap Ketimpangan Pendapatan Antar Wilayah Kabupaten/Kota Jawa Timur Tahun 2017-2021	- Ketimpangan Pendapatan - IPM	- UMP - PDRB - Infrastruktur Listrik - Investasi PMDN	IPM memiliki pengaruh negatif dan signifikan, investasi PMDN memiliki pengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap ketimpangan pendapatan.	EKOMA, Vol. 3 No. 5, Juli 2024
	Sutrisno, Shirly Risfia Anggraeni dan Siti Alfiyana (2024)				
8	Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, IPM, dan TPAK Terhadap Ketimpangan Pendapatan di Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Selatan	- Ketimpangan Pendapatan - IPM	- Pertumbuhan Ekonomi - TPAK - UMP - Konsumsi listrik - PDRB	TPAK dan IPM berpengaruh signifikan sementara pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh signifikan, namun secara bersama- sama variabel	JIEP, Vol. 8 No. 1, 2025

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Muhammad Lutphi Azhar dan M. Rusmin Nuryadin (2025)			berpengaruh Signifikan terhadap ketimpangan pendapatan	
9	Analisis Pengaruh Populasi, Pertumbuhan Ekonomi, IPM, Investasi dan Pengangguran Terhadap Ketimpangan Pendapatan di Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2019-2023 Deny Irawan, Baik Saripta Wijimulawiani Muhamad Bai'ul Hak (2024)	- Ketimpangan Pendapatan - IPM	- Pertumbuhan Ekonomi - Populasi - Investasi - Pengangguran	IPM berpengaruh positif dan signifikan, jumlah penduduk berpengaruh positif dan tidak signifikan, pertumbuhan ekonomi dan investasi berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap ketimpangan pendapatan. Sementara, pengangguran berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap ketimpangan pendapatan	EKUILNOMI, Vol. 6 No. 3, Nov 2024
10	Determinan Ketimpangan Pendapatan Dalam Upaya Pemerataan Pembangunan di Pulau Jawa Damar jati dan Sodik Dwi Purnomo (2023)	- Ketimpangan Pendapatan - IPM	- Pertumbuhan Ekonomi - Investasi - PAD - UMP - PDRB - Konsumsi listrik	Pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif signifikan, indeks pembangunan manusia berpengaruh negatif signifikansi investasi berpengaruh positif tidak signifikan, Pendapatan asli daerah berpengaruh positif tidak signifikan terhadap ketimpangan pendapatan	JUPIN Vol. 3, No. 3, Desember 2023

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
11	Analisis Determinan Ketimpangan Pendapatan di Pulau Jawa tahun 2017-2022 Diana Wijayanti, dan Ismayana Dwi Nanda Putri (2023)	- Ketimpangan Pendapatan - PDRB - IPM	- TIK - Konsumsi listrik - UMR	UMR berpengaruh negatif terhadap ketimpangan pendapatan, sedangkan Indeks TIK berpengaruh positif terhadap ketimpangan pendapatan di Pulau Jawa. Sementara itu, PDRB dan IPM tidak berpengaruh terhadap ketimpangan pendapatan di Pulau Jawa.	Jurnal Kebijakan Ekonomi dan Keuangan, Vol. 2 Issue 2, 2023
12	Determinan Ketimpangan Pendapatan di Seluruh Provinsi di Sumatera Agra Julihanza dan Rifki Khoirudin (2023)	- Ketimpangan Pendapatan - UMP	- Pertumbuhan Ekonomi - Jumlah penduduk - Investasi - Inflasi - PDRB - IPM - Konsumsi listrik	Pertumbuhan ekonomi dan investasi berpengaruh negatif tidak signifikan, jumlah penduduk dan investasi berpengaruh negatif signifikan terhadap ketimpangan pendapatan, namun secara bersama-sama semua variabel berpengaruh signifikan terhadap ketimpangan pendapatan	JMSD, Vol. 1 No. 2, 2023
13	Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Ketimpangan Pendapatan di Pulau Jawa Tahun 2014-2018 Dani Henji Prastiwi	- Ketimpangan Pendapatan - PDRB	- Inflasi - Investasi - IPM - UMP - Konsumsi listrik	PDRB memiliki pengaruh negatif signifikan, Inflasi serta investasi secara individual tidak memiliki pengaruh terhadap ketimpangan secara simultan variabel PDRB, inflasi dan	DINAMIC, Vol. 2 No.1, 2020

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Lorentino Togar Laut, dan Rian Destiningsih (2020)			investasi secara bersamaan memiliki pengaruh terhadap ketimpangan pendapatan	
14	Faktor Berpengaruh Pada Ketimpangan Distribusi Pendapatan Enam Provinsi di Pulau Jawa Daivy Olliffiana dan Rifki Khoirudin (2022)	- Ketimpangan Pendapatan - UMP - IPM	- Pertumbuhan Ekonomi - Tingkat Desentralisasi Fiskal - PDRB - Konsumsi listrik	Upah minimum dan tingkat pengangguran berpengaruh signifikan, sedangkan pertumbuhan ekonomi, tingkat desentralisasi, dan indeks pembangunan manusia tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap ketimpangan pendapatan.	BALANCE, Vol. 19 No. 1 Januari 2022
15	Analisis Faktor- Faktor yang Mempengaruhi Ketimpangan Pendapatan di Pulau Jawa 2009-2021 Siti Marti'ah (2025)	- Ketimpangan Pendapatan - IPM	- Kepadatan penduduk - Pengangguran - Inflasi - Pembentukan modal tetap bruto - Indeks Pembangunan Teknologi Informasi - UMP - PDRB - Konsumsi listrik	Pengangguran dan IPM berpengaruh positif signifikan, sedangkan kepadatan penduduk berpengaruh negatif signifikan. Variabel inflasi, PMTB, dan IPTIK tidak berpengaruh signifikan secara parsial, namun seluruh variabel secara simultan signifikan mempengaruhi ketimpangan pendapatan.	JUREMI, Vol. 4 No. 6 Mei 2025
16	Pengaruh Jumlah Penduduk, Investasi, dan IPM Terhadap	- Ketimpangan Pendapatan - IPM	- Jumlah Penduduk - Investasi - UMP - PDRB	Jumlah penduduk dan investasi memiliki pengaruh signifikan terhadap ketimpangan	<i>Journal of Economics and Business UBS</i> , Vol. 14 No. 1 Januari-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Ketimpangan Pendapatan di Kalimantan Barat Dessie Yuliana dan Rosyadi (2025)		- Konsumsi listrik	pendapatan, sedangkan IPM tidak menunjukkan pengaruh yang signifikan.	Februari 2025
17	Analysis of Economic Growth, Minimum Wage, Unemployment, and HDI on Income Distribution Inequality in Sukawesi Muhammad Fahrur Rozi dan Hastarini Dwi Atmanti (2024)	- Ketimpangan pendapatan - UMP - IPM	- Pertumbuhan Ekonomi - Pengangguran - Konsumsi listrik - PDRB	secara parsial, pertumbuhan ekonomi dan upah minimum berpengaruh negatif signifikan, sementara pengangguran dan PM berpengaruh signifikan terhadap ketimpangan pendapatan. Sedangkan secara simultan keempat variabel tersebut berpengaruh signifikan terhadap ketimpangan pendapatan	SINOMICS, Vol. 3 No.5 2024
18	Is the era of declining global income inequality over? Ravi Kanbur, Eduardo Ortiz-Juarez, dan Andy Sumner (2024)	- Ketimpangan pendapatan	- Mean Logarithmic Deviation (MLD) - Pendapatan per kapita negara - IPM - PDRB - UMP - Konsumsi listrik	Tren penurunan ketimpangan pendapatan global telah melambat dan cenderung berbalik arah akibat dinamika pertumbuhan ekonomi di negara-negara berkembang dan faktor demografis serta struktural	<i>Structural Change and Economic Dynamics</i> , Vol. 70, 2024, Hal. 45-55.
19	TFP and global growth: Shaping cross-country income inequality, 1960-2019	- Ketimpangan pendapatan	- PDB per kapita - Total Faktor Produktivitas - Investasi	Efisiensi total faktor produksi sebagai kontributor utama pada pertumbuhan ekonomi global	<i>Economic Analysis and Policy</i> , Vol. 88, 2025, Hal 101-213

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Fernando del Río dan Francisco-Xavier Loressesbut (2025)		<ul style="list-style-type: none"> - Distorsi pasar tenaga kerja - Alokasi sumber daya - IPM - UMP - PDRB - Konsumsi listrik 	<ul style="list-style-type: none"> dan perubahan ketimpangan antar negara, pada tahun 1960-2000 didominasi oleh distorsi investasi yang meningkatkan ketimpangan pendapatan 	

2.2 Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran berfungsi sebagai jembatan konseptual yang menghubungkan berbagai variabel penelitian dan mendemonstrasikan kontribusi teori-teori sebelumnya dalam menjelaskan dan menganalisis fenomena empiris yang sedang diteliti. Berdasarkan teori yang ada, penelitian ini secara garis besar bertujuan untuk menganalisis hubungan antara indeks pembangunan manusia, upah minimum provinsi, produk domestik regional bruto, dan konsumsi listrik terhadap ketimpangan pendapatan di Pulau Jawa tahun 2018-2024.

2.2.1 Hubungan Indeks Pembangunan Manusia dengan Ketimpangan Pendapatan

Teori *human capital* menjelaskan bahwa Indeks Pembangunan Manusia berpengaruh negatif terhadap ketimpangan pendapatan melalui meningkatnya kualitas sumber daya manusia dalam dimensi pendidikan, kesehatan, dan standar hidup. Menurut perspektif *human capital theory* yang dikembangkan oleh Becker (1964) dalam Arbianti (2025), peningkatan tingkat pendidikan formal dan kesehatan masyarakat meningkatkan produktivitas tenaga kerja, sehingga kelompok masyarakat dengan IPM yang lebih tinggi memiliki kemampuan yang

lebih baik dalam mengakses peluang ekonomi dan meningkatkan pendapatan mereka. Pada gilirannya, peningkatan pendapatan kelompok-kelompok yang sebelumnya tertinggal secara sistematis mengurangi ketimpangan distribusi pendapatan dalam masyarakat. Investasi dalam pendidikan dan kesehatan yang mencerminkan peningkatan IPM tidak hanya meningkatkan *earning potential* individu, tetapi juga menciptakan *spillover effects* positif yang meningkatkan dinamika pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan, sehingga menciptakan mekanisme redistribusi pendapatan yang lebih inklusif dan adil di berbagai lapisan masyarakat. Hubungan negatif antara IPM dengan ketimpangan pendapatan telah dibuktikan melalui berbagai penelitian empiris di Indonesia dalam periode terbaru. Penelitian yang dilakukan oleh Bina et al., (2025) menunjukkan bahwa Indeks Pembangunan Manusia (IPM) berpengaruh negatif terhadap ketimpangan pendapatan pada 34 provinsi Indonesia dalam periode 2019-2024, menunjukkan peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui dimensi pendidikan, kesehatan, dan standar hidup secara konsisten mengurangi ketimpangan distribusi pendapatan. Temuan ini sejalan dengan penelitian Yoertiara & Feriyanto (2022) bahwa variabel IPM menunjukkan pengaruh negatif dan signifikan terhadap ketimpangan pendapatan. Penelitian yang dilakukan oleh Ati et al., (2024) juga mengkonfirmasi bahwa meskipun dengan temuan yang lebih kompleks, peningkatan kualitas *human capital* melalui komponen IPM tetap menjadi salah satu faktor penting dalam mempengaruhi distribusi pendapatan. Konsistensi hasil penelitian ini dengan teori *human capital* memperkuat bukti bahwa pembangunan sumber daya manusia melalui peningkatan IPM merupakan strategi efektif dalam mengurangi

ketimpangan distribusi pendapatan di berbagai wilayah di Indonesia khususnya di Pulau Jawa.

2.2.2 Hubungan Upah Minimum Provinsi dengan Ketimpangan Pendapatan

Teori upah efisiensi menjelaskan bahwa Upah Minimum Provinsi (UMP) berpengaruh negatif terhadap ketimpangan pendapatan melalui mekanisme peningkatan produktivitas tenaga kerja dan redistribusi pendapatan kepada kelompok pekerja berpenghasilan rendah. Menurut prinsip teori upah efisiensi yang dikemukakan oleh Shapiro & Stiglitz, peningkatan upah minimum tidak hanya meningkatkan kesejahteraan pekerja tetapi juga meningkatkan produktivitas mereka melalui perbaikan nutrisi, kesehatan, dan moral kerja yang lebih baik. Ketika pemerintah menetapkan UMP yang lebih tinggi, hal ini menciptakan *floor wage* yang memaksa perusahaan untuk menyesuaikan struktur upah mereka, khususnya bagi pekerja-pekerja yang sebelumnya berpenghasilan di bawah tingkat upah minimum yang baru ditetapkan. Mekanisme *wage compression effect* yang dihasilkan dari kebijakan upah minimum ini mencerminkan prinsip *fair wage-effort hypothesis* dalam teori upah efisiensi, dimana ketimpangan upah antara pekerja berpenghasilan rendah dan menengah menjadi lebih sempit karena kelompok pekerja di bawah menerima kenaikan upah yang signifikan. Dengan mengangkat pendapatan kelompok pekerja yang paling tertinggal dalam distribusi pendapatan, upah minimum provinsi secara efektif mengurangi ketimpangan pendapatan dengan memanfaatkan teori upah efisiensi.

Hubungan negatif antara upah minimum provinsi dengan ketimpangan pendapatan telah dibuktikan melalui berbagai penelitian empiris terbaru di

Indonesia. Penelitian yang dilakukan oleh Surya et al., (2025) di Provinsi Bali menunjukkan bahwa upah minimum berpengaruh negatif dan signifikan terhadap ketimpangan distribusi pendapatan, mengindikasikan bahwa kebijakan peningkatan upah minimum mampu mengurangi ketimpangan pendapatan di kabupaten/kota. Temuan ini sejalan dengan penelitian Sekar Putri & Anggraini (2024) di Kota Tanjungpinang yang menemukan bahwa upah minimum memiliki pengaruh negatif signifikan terhadap ketimpangan pendapatan, dengan kesimpulan bahwa peningkatan upah minimum dapat berkontribusi dalam mengurangi ketimpangan pendapatan. Penelitian yang dilakukan oleh Meidiyan et al., (2025) di Provinsi Jambi juga mengkonfirmasi bahwa upah minimum memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap ketimpangan pendapatan, yang berarti bahwa peningkatan upah minimum cenderung menurunkan tingkat ketimpangan dengan efektif meningkatkan daya beli masyarakat berpenghasilan rendah dan mendorong pemerataan pendapatan. Penelitian terbaru oleh Irfan Saputra & Zulham (2023) menunjukkan bahwa upah minimum provinsi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap ketimpangan pendapatan. Konsistensi hasil penelitian ini dengan teori upah efisiensi memperkuat bukti bahwa kebijakan upah minimum provinsi merupakan instrumen efektif dalam mengurangi ketimpangan distribusi pendapatan di berbagai wilayah Indonesia.

2.2.3 Hubungan Produk Domestik Regional Bruto dengan Ketimpangan Pendapatan

Teori pertumbuhan neoklasik menjelaskan bahwa Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dapat memiliki hubungan dengan ketimpangan

pendapatan melalui mekanisme mobilitas faktor-faktor produksi dan proses *trickle-down effect*. Menurut perspektif teori neoklasik yang dikemukakan oleh Robert Solow dan Trevor Swan, pada awal proses pembangunan suatu negara, ketimpangan cenderung mengalami peningkatan karena modal dan tenaga kerja ahli terkonsentrasi di daerah-daerah yang sudah maju, menghasilkan perbedaan dalam pertumbuhan ekonomi. Teori ini mengakui bahwa peningkatan PDRB pada tahap awal pembangunan mencerminkan pertumbuhan ekonomi yang terkonsentrasi, namun pada tahap selanjutnya seiring dengan membaiknya prasarana, fasilitas komunikasi, dan mobilitas faktor produksi yang lebih lancar, pertumbuhan PDRB yang berkelanjutan akan mendorong proses konvergensi dimana wilayah-wilayah yang tertinggal dapat mencapai pertumbuhan ekonomi yang lebih cepat untuk mengejar ketertinggalan mereka. Kelompok ekonom neoklasik sangat optimis bahwa pertumbuhan ekonomi atau peningkatan PDRB pada akhirnya akan mengurangi ketimpangan pendapatan dan kemiskinan melalui mekanisme penciptaan lapangan kerja, peningkatan upah riil, dan distribusi pendapatan yang lebih merata ketika pemerintah memfasilitasi mobilitas modal dan tenaga kerja secara efektif di berbagai wilayah.

Hubungan negatif antara PDRB dengan ketimpangan pendapatan telah dibuktikan melalui berbagai penelitian empiris terbaru di Indonesia yang menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dapat mengurangi ketimpangan distribusi pendapatan. Penelitian internasional yang dilakukan oleh Panggabean (2025) yang dipublikasikan dalam *International Journal of Innovative Research and Scientific Studies* dengan analisis 34 provinsi Indonesia

periode 2015-2022 menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap ketimpangan pendapatan, dengan peningkatan pertumbuhan ekonomi mampu menurunkan Gini ratio secara konsisten, mengindikasikan bahwa kebijakan pertumbuhan ekonomi yang tepat dapat mendorong pemerataan pendapatan. Temuan ini sejalan dengan penelitian Sirait et al., (2025) menemukan bahwa *Gross Domestic Product* (GDP) memiliki pengaruh negatif terhadap ketimpangan pendapatan, menunjukkan bahwa peningkatan output ekonomi mampu berkontribusi dalam redistribusi pendapatan yang lebih merata. Penelitian di Pulau Jawa oleh Al Faqih & Alfidhatun (2022) menunjukkan bahwa PDRB sektor sekunder memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap ketimpangan pendapatan, dengan kesimpulan bahwa kenaikan PDRB sektor sekunder mampu mengurangi ketimpangan pendapatan di Pulau Jawa secara efektif melalui penciptaan lapangan kerja di sektor industri pengolahan. Penelitian terbaru oleh Nasyawa Ardelia & Sishadiyati (2025) juga mengkonfirmasi adanya pengaruh negatif dari PDRB terhadap ketimpangan pendapatan ketika diimplementasikan melalui sektor-sektor yang padat karya dan tersebar geografis. Konsistensi hasil penelitian ini dengan teori pertumbuhan neoklasik memperkuat bukti bahwa pertumbuhan PDRB yang berkelanjutan dan dikelola dengan inklusif merupakan instrumen efektif dalam mengurangi ketimpangan distribusi pendapatan di berbagai wilayah Indonesia, terutama ketika pertumbuhan tersebut didukung oleh kebijakan redistribusi yang tepat, investasi pada infrastruktur yang merata, pendidikan, dan program sosial yang menjangkau seluruh lapisan masyarakat.

2.2.4 Hubungan Konsumsi listrik dengan Ketimpangan Pendapatan

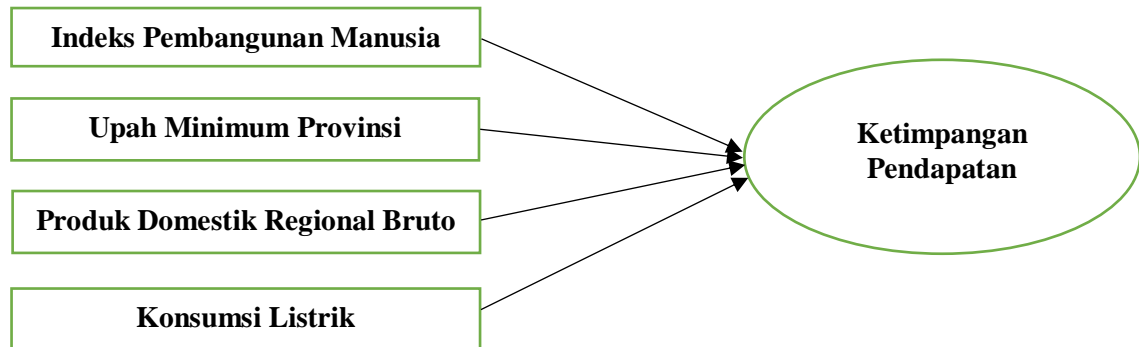
Teori infrastruktur dan pembangunan ekonomi yang dikemukakan oleh Calderón & Servén (2004) menjelaskan bahwa konsumsi listrik memiliki hubungan dengan ketimpangan pendapatan melalui mekanisme pembukaan akses pasar dan peningkatan peluang ekonomi bagi kelompok masyarakat yang tertinggal. Berdasarkan analisis empiris komprehensif oleh Calderón & Servén menemukan bahwa peningkatan kuantitas dan kualitas infrastruktur, termasuk konsumsi listrik, secara signifikan mengurangi ketimpangan distribusi pendapatan dengan cara membantu kelompok miskin dan daerah tertinggal untuk terhubung ke pusat kegiatan ekonomi dan mengakses peluang produktif yang lebih luas. Mekanisme transmisi dari konsumsi listrik terhadap pengurangan ketimpangan meliputi pengurangan biaya produksi dan transaksi, meningkatkan nilai kekayaan bagi kelompok masyarakat kurang mampu khususnya di daerah pedesaan, penciptaan lapangan kerja baru, dan peningkatan kualitas modal manusia melalui akses yang lebih baik terhadap layanan pendidikan dan kesehatan yang memerlukan energi listrik. Dengan demikian, teori infrastruktur dan pembangunan ekonomi menekankan bahwa pembangunan konsumsi listrik yang merata dan berkualitas di berbagai wilayah merupakan instrumen kebijakan yang kuat untuk mencapai redistribusi pendapatan yang lebih inklusif dan mengurangi disparitas ekonomi antarwilayah.

Hubungan negatif antara konsumsi listrik dengan ketimpangan pendapatan telah diverifikasi melalui berbagai penelitian internasional yang mencakup negara-negara berkembang di berbagai negara. Penelitian oleh Alex O et al.,

(2025) yang menganalisis negara-negara berpendapatan rendah dan menengah menemukan bahwa akses listrik berkontribusi negatif terhadap pengurangan ketimpangan pendapatan, dengan studi kasus Brazil menunjukkan bahwa peningkatan akses listrik secara substansial meningkatkan indeks pembangunan manusia di daerah-daerah paling miskin sebelah utara dan timur laut. Penelitian oleh Abdulai et al., (2025) yang menganalisis Sub-Saharan Africa menunjukkan bahwa peningkatan akses listrik berpengaruh negatif dan signifikan terhadap ketimpangan pendapatan dengan efek kumulatif yang meningkat seiring waktu. Studi lintas negara World Bank (2017) berdasarkan *harmonized household survey* data dari 1.6 juta rumah tangga di 14 negara Latin America selama 1992-2012 mengidentifikasi bahwa kebijakan pemerintah dalam mengembangkan konsumsi listrik adalah determinan penting dari ketimpangan akses dan bahwa peningkatan investasi konsumsi listrik yang merata dapat mengurangi disparitas pendapatan dengan margin yang ekonomis signifikan, sejalan dengan saran Calderón dan Servén untuk persiapan simulasi di negara-negara Latin America.

Berdasarkan kajian teoritis mendalam yang telah disajikan dan didukung oleh bukti empiris dari berbagai penelitian terdahulu bahwa Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Upah Minimum Provinsi (UMP), Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), dan konsumsi listrik memiliki pengaruh negatif signifikan terhadap ketimpangan pendapatan, maka keempat variabel tersebut akan diuji secara empiris untuk mengetahui pengaruhnya terhadap ketimpangan pendapatan di Pulau Jawa. Untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai pola hubungan dan mekanisme transmisi dalam kerangka pemikiran penelitian ini,

visualisasi konseptual tersaji dalam diagram kerangka pemikiran yang disajikan pada gambar di bawah ini.



Gambar 2. 3 Kerangka Pemikiran

2.3 Hipotesis

Hipotesis merupakan pernyataan antisipatori yang memberikan penjelasan tentatif atas masalah penelitian yang telah diidentifikasi. Karena hipotesis masih berstatus sementara dan belum terbukti secara empiris, maka diperlukan pengujian terhadap data faktual yang telah dihimpun untuk memastikan keakuratan dan keberlakuannya. Dengan demikian, hipotesis-hipotesis yang akan diuji dalam konteks penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Diduga indeks pembangunan manusia, upah minimum provinsi, PDRB dan konsumsi listrik secara parsial berpengaruh negatif terhadap ketimpangan pendapatan di Pulau Jawa tahun 2018-2024.
2. Diduga indeks pembangunan manusia, upah minimum provinsi, PDRB dan konsumsi listrik secara bersama sama berpengaruh terhadap ketimpangan pendapatan di Pulau Jawa tahun 2018-2024.